

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MELALUI PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT PADA PRODI ADMINISTRASI PUBLIK DI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI

Muhamad Akbar¹, Siti Raudah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: muhamadbar03@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah mahasiswa yang mendaftar pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) namun gagal melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sistem koordinasi yang diterapkan oleh pihak kampus terhadap mahasiswa yang mengikuti program tersebut, serta belum optimalnya evaluasi yang dilakukan oleh pihak kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari sepuluh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan pemeriksaan oleh anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, telah dilaksanakan dengan baik. Pertama, aspek komunikasi, yang mencakup transmisi, konsistensi, dan sasaran, menunjukkan bahwa dari tiga indikator yang dianalisis, dua indikator, yaitu transmisi dan sasaran, telah memenuhi kriteria yang baik. Kedua, aspek sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas, ditemukan dalam kondisi yang sangat baik. Ketiga, aspek disposisi, mencakup komitmen, dukungan, dan kewenangan, juga menunjukkan hasil yang baik. Keempat, aspek struktur birokrasi, yang meliputi koordinasi dan dampak, menunjukkan bahwa dari dua indikator yang diamati, hanya satu indikator, yaitu dampak, yang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program ini antara lain adalah evaluasi dari pihak kampus yang belum maksimal serta kurangnya sistem koordinasi yang hanya terbatas pada komunikasi online. Sementara itu, faktor pendorongnya meliputi ketepatan sasaran mahasiswa yang mengikuti Program Magang dan Studi Independen sesuai dengan jurusannya, dukungan penuh dari pihak kampus, serta kecukupan sumber daya manusia, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang terlibat.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Magang dan Studi Independen Bersertifikat

ABSTRACT

The background of the problem in this study shows that there are a number of students who registered for the Certified Internship and Independent Study Program (MSIB) but failed to proceed to the next stage. This is due to the lack of a coordination system implemented by the campus for students who participate in the program, as well as the less than optimal evaluation carried out by the campus. This study aims to evaluate the implementation of the Independent Learning Campus Merdeka Program (MBKM) through the Certified Internship and Independent Study Program in the Public Administration Study Program, Amuntai College of Administrative Sciences, and the factors that influence it. The method used in this study is descriptive qualitative, with data collection carried out through observation, interviews, and documentation. Data sources were obtained from ten informants selected using purposive sampling techniques. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Data

credibility testing is carried out through extended observations, increased persistence, triangulation, use of reference materials, and member checking. The results of the study indicate that the implementation of the Independent Learning Independent Campus (MBKM) Program through the Certified Internship and Independent Study Program in the Public Administration Study Program, Amuntai College of Administrative Sciences, has been carried out well. First, the communication aspect, which includes transmission, consistency, and targets, shows that of the three indicators analyzed, two indicators, namely transmission and targets, have met good criteria. Second, the resource aspect, consisting of human resources and facilities, was found to be in very good condition. Third, the disposition aspect, including commitment, support, and authority, also showed good results. Fourth, the bureaucratic structure aspect, which includes coordination and impact, shows that of the two indicators observed, only one indicator, namely impact, has been implemented quite well. Factors that hinder the implementation of this program include the evaluation from the campus which has not been maximized and the lack of a coordination system that is only limited to online communication. Meanwhile, the driving factors include the accuracy of the target of students who take part in the Internship and Independent Study Program according to their majors, full support from the campus, and the adequacy of human resources, consisting of lecturers and students involved.

Keywords: Implementation, Program, Certified Internship and Independent Study Program

PENDAHULUAN

Dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terdapat dua aspek utama yang perlu diketahui, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar merujuk pada pemberian kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, serta pembebasan dari birokratisasi. Dalam konteks ini, dosen dibebaskan dari birokrasi yang kompleks, sedangkan mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang studi sesuai dengan minat mereka. Di sisi lain, Kampus Merdeka merupakan konsep baru yang memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh kemerdekaan dalam proses belajar di perguruan tinggi, sebagai perpanjangan dari konsep Merdeka Belajar.

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar selama tiga semester di luar program studi mereka, yang mencakup pengambilan mata kuliah di luar program studi selama satu semester dan kegiatan di luar perguruan tinggi selama dua semester. Agar dapat berpartisipasi dalam program MBKM, mahasiswa diharuskan menempuh pendidikan minimal selama tiga semester.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkup perguruan tinggi bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan soft skill dan hard skill, serta memiliki kepribadian yang baik dan kemampuan kepemimpinan. Menurut Nadiem Makarim, "Seiring dengan perubahan zaman di era revolusi industri 4. 0 yang sangat terkait dengan teknologi, program MBKM akan memberikan kebebasan dari birokrasi serta otonomi kepada lembaga pendidikan dan dosen, serta memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk memilih bidang yang mereka minati" (Makarim, 2021).

Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM diatur dalam beberapa peraturan, antara lain: Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Standar Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum; Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 terkait Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri; serta Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Proses partisipasi dalam program MBKM dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama meliputi

sosialisasi dan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan MBKM, yang selanjutnya diikuti oleh proses seleksi bagi mahasiswa. Mahasiswa yang memenuhi kriteria verifikasi kelayakan akan diperbolehkan untuk mengajukan diri mengikuti program MBKM, dengan pendaftaran yang harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mitra. Tahap kedua adalah tahap seleksi dan pelaksanaan, di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh mitra tempat pelaksanaan. Pada tahap ketiga, kegiatan MBKM sebagai proses pembelajaran perlu didokumentasikan dalam bentuk logbook kegiatan.

Salah satu program yang dialokasikan dalam kerangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, serta sikap yang relevan dengan dunia industri melalui praktik kerja dan belajar langsung dalam proyek atau permasalahan nyata. Pengalaman belajar di luar lingkungan perguruan tinggi yang dilaksanakan dengan aktivitas pembelajaran terstruktur akan dikonversi menjadi SKS (Sistem Kredit Semester) bagi mahasiswa.

Kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang berfungsi sebagai trainee di dalam organisasi mitra selama periode waktu tertentu, dengan kriteria sebagai berikut: mahasiswa dapat terlibat langsung dalam aktivitas internal institusi tempat magang, memperoleh ilmu yang relevan dari institusi tersebut, serta dalam penyelesaian proyek, mendapatkan pengetahuan melalui modul pembelajaran yang berkaitan dengan isu proyek yang didampingi oleh mentor profesional. Mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk menjadi karyawan penuh waktu (FTE - Full Time Employee) setelah kinerjanya dinilai selama masa magang. Selain itu, sertifikasi keterampilan yang diterbitkan oleh industri akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mahasiswa

Program ini juga mencakup pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi atau industri, yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi di dunia kerja dan dunia usaha, dalam bentuk kursus singkat (short course), kemah kerja (bootcamp), Massive Open Online Course (MOOC), serta berbagai format lainnya, yang dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi antara peserta serta personel dari organisasi mitra dalam suatu proyek atau studi kasus.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi swasta yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang secara aktif mendukung mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam Program MBKM, khususnya pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Sejak pelaksanaan Magang dan Studi Independen Bersertifikat Batch 6, delapan mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik di STIA Amuntai berhasil ikut serta, dilanjutkan dengan Batch 7 yang diikuti oleh dua mahasiswa, yang saat ini masih berstatus aktif dalam program tersebut.

Adapun beberapa kampus swasta lainnya di Kalimantan Selatan juga mengambil bagian dalam Program MBKM, khususnya Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, yang banyak diminati oleh mahasiswa di setiap semesternya.

Berbagai prosedur telah dilaksanakan, dimulai dari sosialisasi yang dilakukan pihak kampus kepada mahasiswa melalui media sosial dan pertemuan daring via Zoom. Selanjutnya, mahasiswa diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0, telah menempuh minimal 3 semester saat mengikuti program, serta melengkapi berkas seperti Curriculum Vitae (CV), Pakta Integritas, Transkrip Nilai, dan Surat Rekomendasi dari kampus. Proses pelengkapan berkas administrasi kini dapat dilakukan secara daring melalui situs web Kampus Merdeka dan akan diverifikasi oleh pihak kampus asal mahasiswa.

Setelah memenuhi syarat administrasi, mahasiswa melanjutkan tahap pemilihan posisi dan tempat magang, maksimal memilih 22 posisi, dan kemudian menunggu untuk dihubungi oleh pihak perusahaan terkait proses seleksi administrasi, atau dapat melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Tahapan seleksi selanjutnya mencakup pengumuman dari perusahaan untuk menghubungi mahasiswa baik melalui WhatsApp atau email, bergantung pada kebijakan perusahaan dan posisi yang dilamar. Metode seleksi bervariasi antar posisi atau perusahaan, meliputi seleksi tertulis (soal

ujian), wawancara, dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion). Tahapan terakhir, jika mahasiswa dinyatakan lulus di semua tahapan, adalah keputusan untuk menerima atau menolak posisi yang ditawarkan.

Melihat kurangnya minat dan perkembangan jumlah mahasiswa yang berhasil dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di STIA Amuntai, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi.

Berdasarkan observasi awal yang didukung oleh data yang ada, terdapat beberapa fenomena permasalahan terkait Magang dan Studi Independen Bersertifikat yang diikuti oleh mahasiswa STIA Amuntai, sebagai berikut:

1. Terdapat banyak mahasiswa yang mendaftar pada program MBKM melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, namun sejumlah besar dari mereka tidak berhasil melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa mahasiswa yang berhasil dalam seleksi administrasi sering kali tidak lolos ke fase selanjutnya, yaitu tahap di mana mereka dihubungi oleh pihak perusahaan atau tempat magang. Proses seleksi ini bervariasi tergantung pada posisi yang dilamar, dengan adanya seleksi tertulis (jawaban soal), wawancara, dan Diskusi Grup Terfokus (FGD). Pada tahap ini, banyak mahasiswa gagal karena jawaban atau hasil wawancara mereka tidak sesuai dengan harapan pihak perusahaan. (Sumber: Observasi peneliti melalui wawancara dengan alumni mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat batch 6)
2. Terdapat kekurangan dalam sistem koordinasi yang dilakukan oleh kampus terhadap mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Koordinasi yang dilakukan bersifat terbatas dan menggunakan komunikasi secara daring. Hal ini terindikasi dari cara Koordinator PT melakukan koordinasi melalui komunikasi online, seperti melalui grup WhatsApp atau pertemuan Zoom, disebabkan oleh jarak yang jauh antara Koordinator PT dan mahasiswa yang terlibat dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat ini. (Sumber: Observasi peneliti melalui wawancara dengan alumni mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat batch 6)
3. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap mahasiswa setelah menyelesaikan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat belum berlangsung secara optimal. Evaluasi untuk Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di STIA Amuntai hanya dilaksanakan sekali, yaitu pada batch 6, sementara untuk batch-batch sebelumnya belum diadakan evaluasi. (Sumber: Observasi peneliti dengan mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat batch 6)

Ruang lingkup studi kebijakan publik sangatlah luas, mencakup berbagai bidang dan sektor, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, serta hukum. Dari segi hierarki, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, serta keputusan bupati/walikota.

Menurut Woll (1966) yang dikutip oleh Hayat (2018:20), kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas pemerintahan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik berfungsi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat dan diupayakan untuk diselesaikan melalui kebijakan yang mengikat seluruh anggota masyarakat tersebut. Keputusan tersebut bersifat mengikat bagi banyak orang pada tingkat strategis atau dalam hal garis besar dan dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang memiliki kekuatan mengikat, kebijakan publik harus disusun oleh otoritas politik, yaitu individu atau kelompok yang memperoleh mandat dari publik, biasanya melalui proses pemilihan, untuk bertindak atas nama masyarakat luas. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan publik akan dikelola oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan. Proses pembuatan kebijakan publik dimulai dengan perumusan masalah, yang merupakan langkah awal dalam merancang

kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang berfungsi sebagai interpretasi dari kebijakan yang ditetapkan. Sebagai contoh, dari sebuah undang-undang dapat diturunkan sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta Peraturan Daerah. Selain itu, implementasi juga melibatkan penyiapan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, serta penunjukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya, aspek penting lainnya adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Van Metter dan Van Horn, sebagaimana dikemukakan dalam Agustino (2014:195), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai berbagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun kelompok yang berkaitan dengan pemerintahan atau sektor swasta, yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Secara umum, implementasi dipahami sebagai tahap dalam proses kebijakan yang berlangsung setelah penetapan Undang-Undang. Proses ini melibatkan beragam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama dalam menjalankan kebijakan, dengan tujuan meraih hasil yang sesuai dengan sasaran dari kebijakan atau program-program yang telah ditetapkan.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kebijakan dapat diimplementasikan secara sempurna, mengingat bahwa proses implementasi kebijakan pada umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan sekadar merumuskannya. Sebagaimana diketahui, proses perumusan atau formulasi kebijakan memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek dan disiplin ilmu yang relevan, serta pertimbangan terhadap kepentingan berbagai pihak yang berperan sebagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel utama yang memengaruhi implementasi program kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi, menurut George C. Edward III, memainkan peranan krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman para pengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Pengetahuan yang jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif. Dengan demikian, setiap keputusan kebijakan dan aturan pelaksanaan harus disampaikan kepada pihak yang tepat. Selain itu, informasi yang dikomunikasikan perlu tepat, akurat, dan konsisten. Proses komunikasi yang baik akan mendorong konsistensi antara pengambil keputusan dan implementor dalam melaksanakan kebijakan di masyarakat.

2. Sumber Daya

Dalam pandangan George C. Edward III, sumber daya adalah elemen kunci untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja, dana, infrastruktur fisik, informasi, dan kewenangan. Sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini tidak hanya tersedia, tetapi juga dikelola dan dialokasikan dengan efektif. Staf yang kompeten merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan; kekurangan tenaga ahli dapat menimbulkan risiko kegagalan. Selain itu, informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah juga sangat krusial. Kewenangan formal diperlukan untuk melaksanakan perintah, sementara fasilitas fisik yang memadai juga berkontribusi pada suksesnya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki staf yang kompeten, pemahaman yang baik, kewenangan yang memadai, dan fasilitas pendukung yang lengkap.

3. Disposisi

Disposisi, sebagai faktor ketiga, memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III. Sikap dan perilaku pelaksana

kebijakan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Untuk mencapai efektivitas, pelaksana perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta mampu melaksanakan kebijakan tanpa bias. Faktor-faktor seperti pengangkatan birokrat dan insentif dapat menjadi tantangan yang nyata bagi pelaksanaan kebijakan yang diinginkan. Oleh karena itu, pemilihan pelaksana kebijakan harus melibatkan individu yang berkomitmen kepada kepentingan masyarakat. Manipulasi terhadap insentif juga dapat mendorong pelaksana untuk melaksanakan tugas dengan baik, karena secara umum, individu cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau organisasi. Dengan demikian, insentif dapat berfungsi sebagai pendorong dalam memenuhi kepentingan individu atau kelompok.

4. Struktur Birokrasi

George C. Edward III juga menekankan bahwa struktur birokrasi memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber daya dan pengetahuan sudah tersedia, kompleksitas kebijakan dapat terhambat jika struktur birokrasi tidak mendukung. Kerja sama yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif. Dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan koordinasi tanggung jawab di antara pegawai dari berbagai unit kerja. Melalui SOP, pegawai dapat melaksanakan kegiatan rutin sesuai standar yang berlaku. Selain itu, koordinasi dan pemahaman tentang kolaborasi antara mitra penyelenggara program juga harus menjadi perhatian, agar tanggung jawab dapat dibagi dengan baik di antara unit kerja dalam mencapai tujuan yang lebih baik.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan inisiatif yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan untuk mendorong mahasiswa agar menguasai beragam disiplin ilmu, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja. Kebijakan ini dikukuhkan oleh Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020, yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka selama satu semester dan terlibat dalam kegiatan di luar perguruan tinggi selama dua semester. Melalui program MBKM, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan ketangguhan diri, selaras dengan tuntutan zaman, dan siap menjadi pemimpin yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Pada dasarnya, program MBKM bertujuan untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan soft skills maupun hard skills yang matang dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, diharapkan angka pengangguran di kalangan sarjana di Indonesia dapat menurun. MBKM juga ditujukan untuk membentuk lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkarakter.

Lebih lanjut, salah satu tujuan lain dari program MBKM adalah memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi mereka sesuai dengan passion dan bakat masing-masing. Melalui berbagai program pembelajaran experiential learning yang fleksibel, program ini mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu yang penting dalam memasuki dunia kerja.

PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa variabel yang dianalisis memiliki sifat yang unik. Penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pokok pembahasan secara rinci. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek dan tujuan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana penulis mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari dokumen dan arsip yang ada.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif memiliki peranan yang sangat penting dalam menyampaikan

kebijakan dari pembuat keputusan kepada para pelaksana. Tanpa komunikasi yang lancar, tujuan dari kebijakan tersebut cenderung tidak akan tercapai, karena pelaksana tidak akan memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada implementasi program magang dan studi independen bersertifikat, keterampilan komunikasi antara program MBKM, pihak kampus, dan mahasiswa sangat krusial. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Transmisi

Transmisi informasi merujuk pada proses penyampaian komunikasi yang tepat dan efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

Transmisi informasi mengenai Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai telah dilaksanakan dengan sukses. Informasi terkait program ini disebarkan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, grup WhatsApp, email, serta sosialisasi di kelas, baik secara langsung maupun melalui platform daring seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Dukungan dari pihak kampus juga sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa informasi ini cepat dan jelas diterima oleh mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap metode penyampaian informasi ini, terutama melalui platform online dan interaksi langsung dengan dosen serta alumni program. Dokumentasi yang ada juga memberikan bukti visual, berupa unggahan di media sosial, yang dapat diakses oleh mahasiswa secara mandiri, memperkuat bahwa penyampaian informasi program telah berjalan dengan baik.

Jika dikaitkan dengan Teori Edward, fenomena ini sejalan dengan prinsip komunikasi yang efektif. Edward menekankan bahwa komunikasi yang baik harus melibatkan transmisi informasi yang jelas agar tujuan program dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kampus telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi—media sosial, WhatsApp, dan sosialisasi daring/luring—untuk memastikan penyampaian informasi program berlangsung secara luas dan jelas.

b. Konsistensi

Konsistensi menjadi aspek penting dalam hal ini, mencakup keselarasan dan kesinambungan dalam penyampaian informasi serta penerapan kebijakan di semua tingkatan pelaksanaan. Konsistensi sangat berarti untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, tanpa adanya penyimpangan atau perbedaan interpretasi.

Konsistensi dalam penyampaian informasi mengenai Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai menunjukkan aspek yang positif meskipun menghadapi beberapa kendala. Sosialisasi informasi telah terjaga dengan baik di berbagai batch, yang terbukti dari peningkatan minat serta pendaftaran mahasiswa. Namun, sayangnya, hanya sebagian kecil yang berhasil lolos seleksi.

Di sisi lain, aspek evaluasi program masih tergolong kurang konsisten, karena evaluasi hanya dilaksanakan pada batch 6, tanpa adanya penilaian yang merata di semua batch. Dokumentasi yang ada mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi program berlangsung secara rutin, evaluasi belum diterapkan secara konsisten.

Ketika mengacu pada Teori Edward yang berbicara tentang konsistensi dalam sosialisasi penyampaian informasi, kondisi ini sudah sejalan. Namun, untuk aspek evaluasi, masih dinilai belum maksimal. Secara umum, sosialisasi dan penyampaian informasi program di STIA Amuntai berjalan cukup konsisten di semua batch, sesuai dengan pandangan Edward bahwa konsistensi dapat meningkatkan penerimaan serta partisipasi dalam program tersebut.

c. Sasaran

Berkenaan dengan sasaran, hal ini merujuk pada kelompok, individu, atau institusi yang menjadi target penerapan kebijakan. Sasaran kebijakan ditujukan kepada pihak-pihak yang diharapkan mendapatkan dampak langsung, dan efektivitas kebijakan tersebut dapat diukur berdasarkan perubahan atau manfaat yang dirasakan oleh sasaran tersebut.

Target dari Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai telah dinilai tepat sasaran. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam program ini merasa bahwa kegiatan yang mereka jalani sejalan dengan keahlian serta latar belakang akademis mereka. Sebagai hasilnya, tugas-tugas yang diberikan oleh tempat magang atau perusahaan dapat diselesaikan secara efektif dan maksimal.

Jika kita merujuk pada teori yang diajukan oleh Edward mengenai sasaran dalam implementasi Program Kampus Mengajar, penting untuk memastikan bahwa kebijakan atau program dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam konteks Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di STIA Amuntai, dapat disimpulkan bahwa sasaran program ini sudah tepat. Mahasiswa di jurusan administrasi publik ditempatkan pada bidang yang relevan dengan studi mereka. Ketepatan sasaran ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas program, yang sejalan dengan pemikiran Edward bahwa kesesuaian sasaran akan mendorong pelaksanaan kebijakan dan menciptakan dampak positif yang diharapkan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang mendukung, termasuk sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan wewenang. Dalam penelitian ini, yang berfokus pada implementasi program kampus mengajar, sumber daya yang dimaksud meliputi jumlah mahasiswa yang berpartisipasi, ketersediaan dosen pembimbing, serta fasilitas penunjang seperti akses internet dan infrastruktur.

Sumber daya manusia di STIA Amuntai, termasuk dosen dan petugas lainnya, tergolong memadai dan berkualitas, sehingga dapat mendukung pelaksanaan Program Kampus Mengajar dengan baik. Dosen serta Koordinator Pendidikan Tinggi menunjukkan kompetensi yang solid dalam membimbing mahasiswa, ditambah dengan proses seleksi yang ketat yang semakin mempersiapkan mereka untuk tugas ini. Dokumentasi program juga menunjukkan bahwa tim kampus berhasil melayani dan mendukung mahasiswa, mendukung keberhasilan mereka baik di tempat magang maupun di perusahaan.

Berkaitan dengan teori Edward mengenai sumber daya manusia dalam implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, tampak bahwa dosen dan koordinator program telah menunjukkan kompetensi yang baik, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Edward. Proses seleksi dan pelatihan yang ketat berkontribusi pada kesiapan mereka, sehingga pembimbingan mahasiswa dapat dilakukan dengan lancar dan efektif. Hal ini mendukung pandangan Edward bahwa keberadaan sumber daya manusia yang memadai merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan dalam implementasi program.

b. Fasilitas

Fasilitas mencakup semua sarana fisik dan material yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dengan efektif. Ini termasuk peralatan, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya material lainnya yang vital untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Fasilitas yang disediakan oleh STIA Amuntai untuk mendukung pelaksanaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat sudah sangat memadai, terutama dalam hal persiapan dan administrasi. Mahasiswa pun mengapresiasi bantuan pendaftaran yang mereka terima.

Dalam konteks Teori Edward mengenai fasilitas, kampus STIA Amuntai telah memenuhi tuntutan kebutuhan fasilitas dengan baik. Mahasiswa merasakan manfaat dari fasilitas administrasi dan informasi yang tersedia. Fasilitas administrasi mencakup penyediaan surat rekomendasi, verifikasi data, serta konversi SKS bagi mahasiswa yang

mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Dalam kerangka Teori Edward, keberadaan fasilitas yang cukup memadai dapat berperan sebagai pendorong signifikan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program.

3. Disposisi

Sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan juga memegang peranan penting. Jika para pelaksana tidak memiliki komitmen atau tidak mendukung kebijakan, maka implementasi kebijakan tersebut akan sulit dilakukan secara efektif. Dalam hal ini, disposisi dari dosen, mahasiswa, dan pihak kampus sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.

a. Komitmen

Komitmen merujuk pada dedikasi, tekad, dan sikap positif para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen ini sangat vital, karena sikap dan keseriusan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dapat secara signifikan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut.

Kampus STIA Amuntai menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat melalui penyediaan fasilitas, pengawasan, dan evaluasi yang menyeluruh. Tingkat komitmen mahasiswa pun sangat mencolok, terlihat dari antusiasme dan tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas serta menjalankan program dengan baik. Dokumentasi dari Program Kampus Mengajar semakin menegaskan komitmen kampus untuk melayani mahasiswanya dalam implementasi program ini.

Dalam konteks Teori Edward, komitmen kampus STIA Amuntai tercermin dari dukungan, pengawasan, fasilitas, dan evaluasi yang menunjukkan disposisi positif dan orientasi pada keberhasilan program. Namun, variasi tingkat komitmen di kalangan mahasiswa mengindikasikan adanya perbedaan disposisi di antara pelaksana di lapangan, yang bisa mempengaruhi keberhasilan program secara keseluruhan. Menurut Teori Edward, dedikasi dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat sangat krusial bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Dukungan

Dukungan merupakan salah satu aspek penting dari faktor disposisi, mencerminkan sikap pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Komitmen dan sikap positif pelaksana kebijakan sangat menentukan, karena mereka bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai dukungan dalam implementasi Program MBKM melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, terlihat jelas bahwa sikap pelaksana turut berkontribusi pada keberhasilan program ini.

Dukungan yang diberikan oleh Kampus STIA Amuntai kepada mahasiswanya dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat sangatlah baik. Kampus bukan hanya memberikan motivasi dan dukungan moral, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas administrasi, termasuk konversi nilai SKS. Pelayanan yang diberikan oleh pihak kampus pun terbilang memuaskan.

Mengacu pada Teori Edward, dukungan yang diberikan oleh Kampus STIA Amuntai dapat dianggap sangat efektif. Edward menekankan bahwa dukungan yang kuat dan sikap positif dari pelaksana kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi. Hal ini dikarenakan dorongan tersebut memberikan motivasi bagi mahasiswa, sebagai pelaksana program, untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh antusiasme dan tanggung jawab.

c. Wewenang

Wewenang merupakan salah satu elemen krusial yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, wewenang merujuk pada otoritas formal yang dimiliki oleh para pelaksana untuk menjalankan dan menerapkan kebijakan yang telah

ditentukan. Otoritas ini memberikan legitimasi bagi pelaksana untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Kampus memberikan wewenang yang cukup substansial kepada koordinator Program Studi (PT) dalam memantau dan mengawasi kegiatan mahasiswa. Sayangnya, pengawasan yang dilakukan hanya terbatas pada media online, seperti grup WhatsApp atau pertemuan melalui Zoom. Meskipun demikian, bentuk pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kampus juga memberikan wewenang penuh kepada mahasiswa untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik.

Dalam konteks ini, Teori Edward menyoroti pentingnya dukungan wewenang yang jelas dan memadai bagi pelaksana yang efektif. Pemberian wewenang menyeluruh oleh kampus STIA Amuntai kepada Koordinator PT mencerminkan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Edward. Wewenang ini memberikan fleksibilitas dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Koordinator PT dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan program, baik melalui kunjungan langsung maupun laporan rutin.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang kompleks dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Agar program berjalan efektif, diperlukan struktur birokrasi yang mendukung kerjasama lintas departemen. Dalam konteks Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), peneliti ingin mengeksplorasi apakah terdapat koordinasi yang baik antara pihak kampus, Kemendikbudristek, serta lembaga magang atau perusahaan yang menerima mahasiswa dalam penyelenggaraan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan elemen krusial dari struktur birokrasi yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi mencakup bagaimana berbagai unit atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi di Kampus STIA Amuntai saat ini belum berjalan dengan baik dan efektif. Koordinator PT telah berupaya melakukan koordinasi dengan mahasiswa yang mengikuti Program Magang dan Studi Independen bersertifikat. Namun, komunikasi yang dilakukan masih sebatas online, seperti melalui grup WhatsApp atau pertemuan Zoom. Di perusahaan atau tempat magang, terdapat peran Mentor yang aktif dalam membimbing mahasiswa dan memastikan bahwa kegiatan program dapat berlangsung dengan lancar.

b. Dampak

Dampak adalah salah satu elemen penting dalam struktur birokrasi yang memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, koordinasi mengacu pada bagaimana program tersebut memengaruhi mahasiswa, baik dari segi positif maupun negatif.

Dampak dari pelaksanaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat dapat dikatakan sangat positif. Sebelum mengikuti program ini, mahasiswa umumnya belum terbiasa dengan lingkungan dunia kerja. Namun, setelah menyelesaikan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, mereka memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga dalam konteks profesional. Beberapa perkembangan yang terlihat pada mahasiswa yang mengikuti program ini mencakup peningkatan pemahaman mengenai dunia kerja, pengembangan soft skill, serta kemampuan berkolaborasi dalam tim di perusahaan atau instansi tempat mereka ditugaskan. Hal ini juga tercermin dari kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan mencapai target yang diberikan oleh perusahaan.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar (MBKM) Melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Pada Prodi Administrasi Publik Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

1. Faktor Penghambat

- a. Belum maksimalnya evaluasi dari pihak kampus
 - b. Kurangnya sistem koordinasi yang dilakukan oleh kampus kepada pihak mahasiswa yang mengikuti program. Koordinasi hanya dilakukan dengan cara komunikasi online.
2. Faktor Pendukung
- a. Ketepatan sasaran mahasiswa yang mengikuti Program Magang dan Studi Independen sesuai dengan jurusannya masing-masing.
 - b. Dukungan Penuh dari Pihak Kampus
 - c. Sumber Daya Manusia yang Memadai seperti dosen dan mahasiswanya

SIMPULAN

Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program Kampus Mengajar di Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, pada aspek transmisi informasi, program ini sudah berjalan dengan efektif. Informasi mengenai MBKM berhasil disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, grup WhatsApp, email, serta sosialisasi di kelas dan secara daring melalui Zoom Meeting dan Google Meet. Kedua, dalam hal sasaran, program ini menunjukkan ketepatan sasaran. Mahasiswa yang berpartisipasi merasakan relevansi program dengan keahlian dan latar belakang akademik mereka, yang memungkinkan mereka menyelesaikan tugas di tempat magang atau perusahaan secara efektif dan maksimal. Ketiga, dari sisi sumber daya manusia, kualitasnya memadai. Dosen dan Koordinator PT dinilai kompeten dalam membimbing dan mengawasi mahasiswa, sementara proses seleksi yang ketat meningkatkan kesiapan mereka. Keempat, fasilitas yang disediakan juga sudah memadai, terutama dalam tahap persiapan dan administrasi. Bantuan pendaftaran yang diterima mahasiswa mendapat apresiasi yang positif. Kelima, komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak sangat kuat. Hal ini terlihat dari penyediaan fasilitas, pengawasan yang memadai, dan evaluasi yang konsisten. Mahasiswa menunjukkan komitmen tinggi dengan antusiasme dan tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Keenam, dukungan dari Kampus STIA Amuntai sangat baik. Dukungan motivasi dan moral dari kampus diiringi dengan penyediaan fasilitas administrasi, seperti konversi nilai SKS, serta pelayanan yang memuaskan. Ketujuh, wewenang yang diberikan terbilang cukup baik. Koordinator PT diberikan kekuasaan yang luas untuk memantau dan mengawasi kegiatan mahasiswa. Namun, sayangnya, pengawasan ini masih dilakukan secara online, melalui grup WhatsApp atau Zoom Meeting. Meskipun demikian, hal ini tetap membantu memastikan pelaksanaan tugas mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan. Kampus juga memberikan wewenang penuh kepada mahasiswa agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Kedelapan, dampak program ini sangat baik. Sebelum mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, mahasiswa tidak familiar dengan dunia kerja. Namun, setelah mengikuti program tersebut, mereka memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga di dunia profesional. Mahasiswa yang terlibat dalam program ini mengalami peningkatan dalam soft skills serta kerjasama tim di perusahaan atau instansi selama masa penugasan, yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas dan mencapai target yang diberikan. Meskipun delapan indikator tersebut menunjukkan hasil yang positif, peneliti juga mencatat beberapa area yang masih perlu diperbaiki dalam implementasi program ini. Pertama, pada indikator konsistensi, terdapat ketidakkonsistenan. Evaluasi hanya dilakukan untuk batch 6, sehingga tidak merata di semua batch. Kedua, pada indikator koordinasi, masih belum berjalan dengan baik dan efektif. Koordinator PT telah melakukan koordinasi dengan mahasiswa, namun metode yang digunakan masih bersifat online, melalui grup WhatsApp atau Zoom Meeting, yang mengurangi efektivitas komunikasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo 2017. *Buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*: Bandung. CV Alfabeta.
- Anggara, Dr. Sahya 2014. *Buku Metode Penelitian Administrasi*: Bandung. CV Pustaka Setia
- Pramono, Joko 2020. *Buku Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*: Surakarta. Penerbit UNISRI Press. Cetakan Kurnia Percetakan.
- Tahir, Arifin 2014. *Buku Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV Alfabeta